

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (RKT BKPK) Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama tahun 2026 agar selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan kesehatan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan Rencana Aksi Program, serta sebagai turunan dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. RKT BKPK Tahun 2026 memuat sasaran, indikator kinerja, target, serta dukungan anggaran yang menjadi acuan bagi para Kepala Unit Kerja di lingkungan BKPK dalam mengendalikan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan.

Melalui penyusunan dokumen RKT ini diharapkan tercipta keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sehingga kontribusi BKPK terhadap pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan dapat terwujud secara optimal. Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Jakarta, Januari 2026

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan,

Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Struktur Organisasi	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	9
A. Visi	9
B. Misi	9
C. Tujuan	11
D. Sasaran	11
E. Rencana Kegiatan	12
BAB III RENCANA KINERJA	15
A. Rencana Kinerja BKPK Tahun 2026	15
B. Rencana Anggaran Tahun 2026	26
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
DAFTAR KONTRIBUTOR	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029	11
Tabel III.1 Rencana Kinerja BKPK Tahun 2026	15
Tabel III.2 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2026	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi BKPK	8
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun perencanaan kinerja tahunan sebagai bagian dari siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Perencanaan kinerja tahunan tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah, sehingga menjamin kesinambungan arah kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan secara terukur.

Sejalan dengan amanat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran untuk periode satu tahun. RKT berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis, Rencana Aksi Program, dan Rencana Aksi Kegiatan, serta merupakan turunan langsung dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Melalui RKT, sasaran strategis dan kebijakan pembangunan kesehatan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang lebih rinci dan dapat dilaksanakan.

RKT disusun dalam bentuk kegiatan rinci sebagai hasil penuangan matriks Renja K/L, yang memuat keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja, target kinerja tahunan, serta alokasi anggaran. Penetapan target kinerja tahunan tersebut menjadi bentuk komitmen BKPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara akuntabel, serta sebagai dasar dalam pengukuran capaian kinerja pada akhir tahun anggaran.

Keterpaduan antara RKT dan Renja K/L tercermin dalam keselarasan penggunaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program hingga pada indikator kinerja, target, dan rencana alokasi anggaran. Dalam hal ini, RKT dan Renja K/L merupakan dokumen yang saling melengkapi, dimana Renja K/L memberikan kerangka kebijakan dan arah program, sementara RKT memuat perencanaan kegiatan dan penganggaran secara lebih rinci pada tingkat pelaksanaan.

RKT BKPK Tahun 2026 memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target tahunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPK selama tahun 2026. Penyusunan RKT ini juga memperhatikan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, yang dituangkan melalui struktur Klasifikasi Rincian Output, Rincian Output, hingga tahapan pencapaian output. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan kinerja dan anggaran diharapkan semakin fokus pada hasil dan manfaat yang dihasilkan.

Penyusunan RKT BKPK Tahun 2026 bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja, memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan BKPK selama satu tahun berjalan, serta menjadi instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi capaian kinerja. Selain itu, RKT diharapkan mampu memastikan keselarasan perencanaan pembangunan kesehatan mulai dari rencana jangka menengah hingga rencana tahunan, sehingga pencapaian target kinerja BKPK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BKPK berperan sebagai unit yang mendukung penguatan kebijakan pembangunan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi.

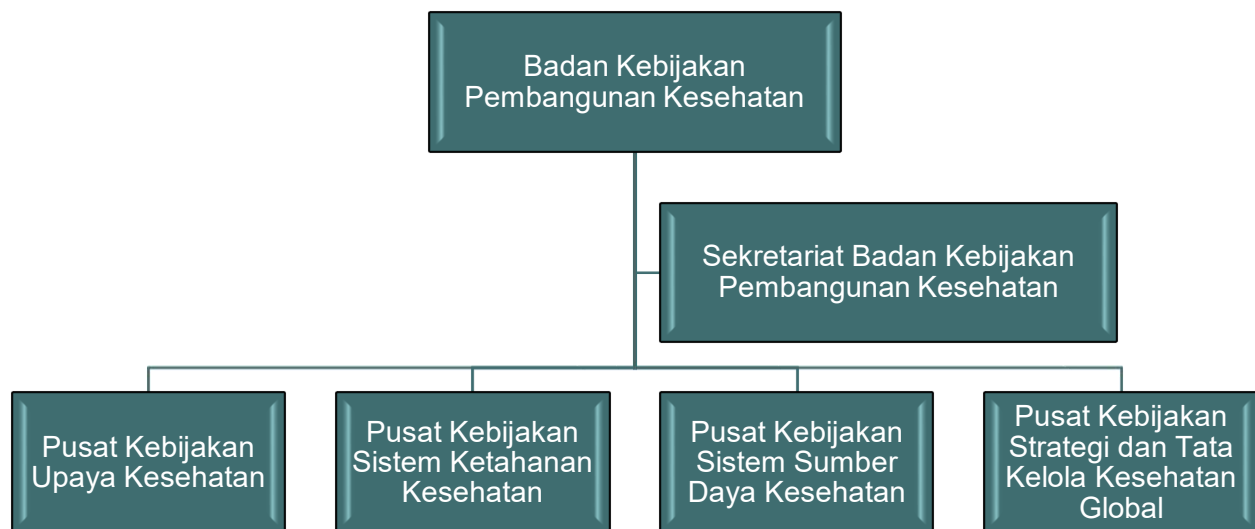
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BKPK menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan. Selain itu, BKPK juga menyelenggarakan fungsi administrasi badan serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi BKPK terdiri atas Sekretariat Badan dan empat Pusat Kebijakan. Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKPK secara efektif, dengan pembagian peran yang jelas antar unit kerja. Susunan organisasi BKPK meliputi:

1. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKPK.
2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, yang bertugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehatan, meliputi upaya kesehatan primer dan lanjutan, sistem rujukan, jejaring pelayanan kesehatan, serta peningkatan mutu fasilitas dan layanan kesehatan.
3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, yang bertugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan,

mencakup farmasi dan alat kesehatan, pengendalian penyakit, kesiapsiagaan dan kedaruratan kesehatan, imunisasi, surveilans, serta kesehatan lingkungan.

4. Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan, yang bertugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem sumber daya kesehatan, meliputi pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, pendanaan dan investasi kesehatan, sistem informasi kesehatan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan.
5. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, yang bertugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang strategi dan tata kelola kesehatan global, termasuk kerja sama internasional, kemitraan pembangunan kesehatan, desentralisasi kesehatan, serta penguatan tata kelola transformasi kesehatan.



Sumber: Permenkes No. 21 Tahun 2024

Gambar I.1 Struktur Organisasi BKPK

Ruang lingkup kebijakan yang menjadi tanggung jawab BKPK dilaksanakan melalui peran dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya, dengan memperhatikan enam pilar transformasi kesehatan serta penugasan strategis dari Menteri Kesehatan. Sekretariat BKPK berperan dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas dan penyediaan dukungan administrasi, sedangkan Pusat Kebijakan melaksanakan fungsi analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan secara terintegrasi sesuai dengan fokus kebijakan masing-masing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkannya dalam visi bidang kesehatan, yaitu “Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut diwujudkan dengan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (1) pemenuhan layanan dasar, (2) pembangunan modal manusia, serta (3) pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan.

Pada bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan stunting serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

B. Misi

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan delapan misi Presiden yang disebut Asta Cita tahun 2025-2029, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Guna memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden itu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Memperkuat tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. Mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. Teknologi Kesehatan yang maju; dan
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

C. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. Teknologi Kesehatan yang maju; dan
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung tujuan di atas, diperlukan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan cakupan layanan esensial menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Akses terhadap layanan yang adil akan mengurangi kesenjangan, mempercepat deteksi dan penanganan penyakit, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dalam situasi darurat seperti pandemi, sistem kesehatan yang tangguh dan responsif juga dibutuhkan. Tercapainya tujuan-tujuan tersebut juga turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dan pembiayaan kesehatan. Di sisi lain, kemajuan teknologi kesehatan juga diukur dari persentase populasi yang menggunakan sistem informasi kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk membangun tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal melalui penerapan prinsip-prinsip birokrasi dan layanan yang agile, efektif, dan efisien.

D. Sasaran

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif
		1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif	3.1	Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis	
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
5	Teknologi Kesehatan yang Maju	5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
6	Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien	6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

E. Rencana Kegiatan

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai unsur pendukung di Kementerian Kesehatan bertugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, BKPK merumuskan sasaran program yang diarahkan pada dua aspek utama, yaitu sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta peningkatan kecukupan, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pendanaan kesehatan. Sasaran program tersebut dikelola bersama oleh unit-unit BKPK yang dijabarkan sebagai berikut:

Program: Program Sumber Daya Kesehatan

1. Sasaran Program: Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Sinkronisasi kebijakan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu prasyarat utama dalam memastikan konsistensi pencapaian indikator kesehatan nasional. Melalui sasaran ini, BKPK berfokus pada peningkatan keterpaduan kebijakan lintas level pemerintahan agar seluruh indikator kesehatan nasional dapat dicapai secara seragam serta peningkatan kualitas kebijakan kesehatan. Indikator utama yang digunakan meliputi:

- **IKP 26.2: Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional**, dengan target 30% pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan upaya penguatan advokasi dan asistensi kebijakan ke daerah. Pencapaian indikator ini akan mendorong terbentuknya regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, serta memperkuat implementasi indikator kesehatan di tingkat lokal. Pengukuran akan dilakukan berbasis data kebijakan daerah yang terekam di Data Pemda, Kemendagri, dan JDIH.

- **IKP 26.3: Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%**, dengan target 55% di tahun 2026. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai bentuk kewajiban dasar pelayanan publik. Ini menuntut kebijakan yang efektif dalam mendorong akuntabilitas daerah, dimonitor melalui data Kemendagri.
- **IKP 26.4: Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan**, dengan target nilai 85 pada tahun 2026. Peningkatan nilai kualitas kebijakan dimaksudkan untuk menjamin tersusunnya kebijakan yang lebih responsif, berbasis bukti, serta mendukung pelaksanaan program kesehatan secara nasional.

Dengan demikian, sasaran ini menekankan pentingnya konsistensi regulasi, harmonisasi kebijakan pusat-daerah, serta peningkatan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. **Sasaran Program: Meningkatnya Kecukupan, Efektivitas, Efisiensi, Keadilan, dan Keberlanjutan Pendanaan Kesehatan**

Pendanaan kesehatan yang memadai dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting untuk menjamin terselenggaranya sistem kesehatan nasional yang kuat. Sasaran program ini diarahkan pada penguatan sistem pendanaan kesehatan yang efisien dan berkelanjutan dalam sistem kesehatan baik melalui optimalisasi belanja pemerintah, peningkatan investasi, maupun pencapaian target global kesehatan. Indikator yang digunakan meliputi:

- **IKP 27.3: Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan**, dengan target 30% pada tahun 2026. Indikator ini akan mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah agar alokasi belanja kesehatan lebih efektif dan proporsional sesuai kebutuhan. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan akuntabilitas dan tata kelola fiskal di daerah.
- **IKP 28.1: Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan**, dengan target 21% pada tahun 2026. Peningkatan investasi diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan kesehatan melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk swasta, dan mendukung pertumbuhan industri kesehatan nasional.
- **IKP 28.2: Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional**, dengan target 55% pada tahun 2026. Indikator ini menunjukkan kontribusi Indonesia dalam pencapaian target kesehatan global sesuai komitmen internasional dengan menggunakan data dari Kemenkes sebagai sumber evaluasi.

Melalui sasaran ini, BKPK berupaya memastikan keberlanjutan pembiayaan kesehatan dengan pendekatan bauran pendanaan, peningkatan investasi, serta kontribusi aktif dalam pencapaian target kesehatan global.

Dengan dirumuskannya sasaran program sebagaimana diuraikan di atas, BKPK berkomitmen untuk mendorong terwujudnya tata kelola kebijakan kesehatan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah, sekaligus memastikan tersedianya pendanaan kesehatan yang cukup, efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan.

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Rencana Kinerja BKPK Tahun 2026

Rencana kinerja BKPK tahun 2026 disusun berdasarkan Renja K/L yang telah diterbitkan dan DIPA yang telah diterbitkan serta mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang pada Permenkes Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, terdapat enam tujuan dan tujuh sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun.

BKPK mendukung pencapaian Tujuan ke-4, yaitu Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan, pada Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui dua sasaran program, yaitu (1) Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah; dan (2) Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan. Selain itu, BKPK juga mendukung Tujuan ke-6, yaitu Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien, pada Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan melalui Program Dukungan Manajemen, pada kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Rencana Kinerja BKPK tahun 2026 dirinci pada tabel berikut.

Tabel III.1 Rencana Kinerja BKPK Tahun 2026

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
Program: 024.D1 Program Sumber Daya Kesehatan			
Sasaran Program : Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah			
IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional		30%	
IKP 26.3 Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%		55%	
IKP 26.4 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan		85 (Nilai)	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
Sasaran Program: Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan			
IKP 27.3 Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan		30%	
IKP 28.1 Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan		21%	
IKP 28.2 Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional		55%	
Kegiatan: 7969. Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			212.000.000
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengelolaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan			
IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional		30%	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.ABG.001 Analisis Situasi Kesehatan	1 RK	175.000
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.AEB Forum	1 Forum	
	Rincian Output: 7969.AEB.001 Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1 Forum	75.000
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.BMB Komunikasi Publik	1 Layanan	
	Rincian Output: 7969.BMB.001 Layanan	1 Layanan	50.000

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
	Diseminasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.2 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah I		30%	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.FBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	Rincian Output: 7969.FBA.001 Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Upaya Kesehatan	9 Provinsi	280.000
IKK 26.4.1 Persentase analisis kebijakan di bidang Upaya Kesehatan		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 7969.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	1 RK	
	Rincian Output: 7969.ABG.002 Pengembangan kebijakan baru bidang upaya kesehatan	1 RK	70.000
	Rincian Output: 7969.ABG.003 Evaluasi Kebijakan bidang upaya kesehatan	5 RK	500.000
	Klasifikasi Rincian Output 7969.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1 RK	1.000.000
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem			

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
ketahanan kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah II		30%	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.FBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	Rincian Output: 7969.FBA.002 Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	10 Provinsi	350.000
IKK 26.4.2 Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 7969.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.ABG.004 Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1 RK	50.000
	Rincian Output: 7969.ABG.005 Evaluasi kebijakan bidang sistem ketahanan kesehatan	6 RK	500.000
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem sumber daya kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.4 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah III		30%	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.FBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
	Rincian Output: 7969.FBA.003 Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	9 Provinsi	60.000
IKK 26.4.3 Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 7969.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.ABG.006 Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1 RK	60.000
	Rincian Output: 7969.ABG.007 Evaluasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	5 RK	845.000
	Klasifikasi Rincian Output 7969.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.PBG.002 Rekomendasi kebijakan <i>Health Technology Assessment</i>	2 RK	850.000
	Rincian Output: 7969.PBG.003 Rekomendasi kebijakan pendanaan kesehatan	1 RK	185.000
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti			
IKK 26.2.5 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah IV		30%	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.FBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
	Rincian Output: 7969.FBA.004 Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	10 Provinsi	204.750
IKK 26.3.1 Persentase capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota yang telah divalidasi		25%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6835.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	Rincian Output: 7969.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi ketercapaian SPM Kesehatan	1 Laporan	77.538
IKK 26.4.4 Persentase analisis kebijakan di bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		80%	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.ABG.008 Pengembangan Kebijakan Baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	2 RK	101.688
	Rincian Output: 7969.ABG.009 Evaluasi Kebijakan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1 RK	51.654
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan			
IKK 27.3.1 Pemenuhan pembiayaan untuk mendukung terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan		100 Kab/Kota	
	Klasifikasi Rincian Output: 6835.AEA Koordinasi		
	Rincian Output: 7969.FAE.002 Fasilitas Penyusunan Kebijakan	1 Laporan	77.538

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
	Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan		
IKK 28.2.1 Jumlah peran strategis Indonesia pada Ol/pertemuan internasional bidang kesehatan		11 Kegiatan	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.AEC Kerja sama		
	Rincian Output: 7969.AEC.001 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	156.306
	Rincian Output: 7969.AEC.002 Dokumen Kerjasama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	156.306
	Rincian Output: 7969.AEC.003 Operasionalisasi ACPHEED	1 Kesepakatan	22.501.215
	Rincian Output: 7969.AEC.004 Dokumen Kerja Sama Mitra Pembangunan dan Transformasi Kesehatan	3 Kesepakatan	312.612
	Rincian Output: 7969.AEC.006 Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional Non Pemerintah	2 Kesepakatan	181.501.215
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.AEG Konferensi dan Event		
	Rincian Output: 7969.AEG.001 Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan	20 Kegiatan	1.122.041
	Rincian Output: 7969.AEG.002 Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional	2 Kegiatan	52.829

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
IKK 28.2.2 Persentase target kesehatan nasional selaras dengan target global		80%	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.AEC Kerja sama		
	Rincian Output: 7969.AEC.007 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	334.308
Sasaran Kegiatan: Tersedianya bahan kebijakan bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan			
IKK 28.1.1 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang farmasi		13%	
	Klasifikasi Rincian Output: 7969.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.ABG.010 Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang farmasi	1 RK	100.000
IKK 28.1.2 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang alat kesehatan		16%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.ABG.011 Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang alkes	1 RK	100.000
IKK 28.1.3 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan		26%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 7969.ABG.012	1 RK	100.000

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi		
Program: 024.WA. Dukungan Manajemen			
Kegiatan: 6797. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			18.479.404
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		78 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	21.455
IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		92,55 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Rincian Output: 6797.CAN.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	72.395
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Rincian Output: 6797.CCL.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4 Unit	424.632

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.956 Layanan BMN	1 Layanan	15.000
	Rincian Output: 6797.EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan	40.000
	Rincian Output: 6797.EBA.959 Layanan Protokoler	1 Layanan	92.518
	Rincian Output: 6797.EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan	709.000
	Rincian Output: 6797.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	10.000
	Rincian Output: 6797.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	10.000
	Rincian Output: 6797.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	16.479.404
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	Rincian Output: 6797.EBB.951 Layanan Sarana Internal	4 Unit	318.000
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBC Layanan Manajemen SDM Internal		
	Rincian Output: 6797.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	60.000
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	Rincian Output: 6797.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	49.000

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)
	Rincian Output: 6797.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	35.000
	Rincian Output: 6797.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	35.000
	Rincian Output: 6797.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	18.000
	Rincian Output: 6797.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan	5.000
IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		82 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBC Layanan Manajemen SDM Internal		
	Rincian Output: 6797.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	388 Orang	45.000
IKK 33.4.16 Nilai maturitas manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		4 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	30.000
IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		95%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	10.000

B. Rencana Anggaran Tahun 2026

Anggaran BKPK yang disetujui tahun 2026 sebesar Rp230.479.404.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah). Anggaran ini digunakan untuk dua program dan dua kegiatan utama dengan rincian pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan		Anggaran (Ribu Rupiah)
I	Program Sumber Daya Kesehatan		212.000.000
	1.	Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	212.000.000
II	Program Dukungan Manajemen		18.479.404
	1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	18.479.404
Total Anggaran			230.479.404

BAB IV

PENUTUP

Program kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, baik yang bersumber dari hasil penelitian dan pengkajian kesehatan maupun dari pemanfaatan data dan informasi lain yang relevan. Penyusunan kebijakan tersebut juga memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan dukungan pendanaan fungsi kesehatan dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan kesehatan.

Dengan disusunnya Dokumen RKT BKPK Tahun 2026, diharapkan terwujud keselarasan antara perencanaan dan penganggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPK. Dokumen RKT ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja, serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja BKPK sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan. Seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan, Dokumen RKT ini dapat dilakukan penyesuaian atau revisi apabila terdapat perubahan kebijakan, sehingga tetap memberikan ruang bagi penyempurnaan dan pemutakhiran sesuai kebutuhan.

Akhir kata, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RKT BKPK Tahun 2026. Penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan RKT BKPK pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN I

RENJA K/L

PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

TAHUN 2026

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG :
10 - Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
11 - Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC)
12 - Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
16 - Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
3. PROGRAM : Program Sumber Daya Kesehatan

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	58.992.587.090,0
04.11	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.000.000,0
04.13	Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	26.057.090,0
04.15	Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	58.965.530.000,0
Total		58.992.587.090,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar		207.826.141,0
01.01	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	22	
01.02	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	71	
01.03	Tingkat Retensi Named dan Nakes	90	
02	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan dalam mencapai UHC		58.966.506.168,0
02.01	Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	3,96	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
02.02	Jumlah masyarakat yang memiliki polis kerjasama antara penyelenggara jaminan	1575000	
02.03	Persentase masyarakat miskin dan kurang mampu yang dibayarkan bantuan iuran jaminan Kesehatan	99,7	
03	Meningkatnya kecukupan pendanaan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan		1.493.832,0
03.01	Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	5	
03.02	Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor non publik	1	
04	Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah		5.411.170,0
04.01	Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	30	
04.02	Persentase Kab/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%	55	
04.03	Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	85	
05	Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan		206.588.830,0
05.01	Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan	30	
05.02	Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan	21	
05.03	Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional	55	
06	Meningkatnya jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan rehabilitasi medis		26.057.090,0
06.01	Persentase orang dengan gangguan penggunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL	10	
Total			59.413.883.231,0

6. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
7967	Pembiayaan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan	58.968.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58.968.000.000,0	0,0	0,0	0,0
7968	Pengelolaan Pembiayaan di IPWL	26.057.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.057.090,0	27.359.945,0	28.727.942,0	30.164.340,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2027	2028	2029
7969	Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	212.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212.000.000,0	219.225.333,0	219.409.406,0	219.599.001,0
7970	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	194.029.345,0	13.796.796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207.826.141,0	185.665.167,0	187.335.757,0	189.088.729,0
Total		59.400.086.435,0	13.796.796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.413.883.231,0	432.250.445,0	435.473.105,0	438.852.070,0

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : D1 - Program Sumber Daya Kesehatan
3. SASARAN PROGRAM : 04 - Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
05 - Meningkatkan kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan
4. KEGIATAN : 7969 - Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 08 - Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
11 - Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
14 - Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
15 - Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global
13 - Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya pengelolaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan		300.000,0
01.01	Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	30	
02	Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti		1.850.000,0
02.01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah I	30	
02.02	Persentase analisis kebijakan di bidang Upaya Kesehatan	80	
03	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan berbasis bukti		900.000,0
03.01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah II	30	
03.02	Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	80	
04	Meningkatnya kebijakan sistem sumber daya kesehatan berbasis bukti		1.786.250,0
04.01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah III	30	
04.02	Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	80	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
05	Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti		574.920,0
05.01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah IV	30	
05.02	Persentase capaian SPM Kesehatan kab/kota yang telah divalidasi	25	
05.03	Persentase analisis kebijakan di bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	80	
06	Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan		206.075.080,0
06.01	Pemenuhan pembiayaan untuk mendukung terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Kesehatan	100	
06.02	Jumlah peran strategis Indonesia pada Ol/pertemuan internasional bidang kesehatan	11	
06.03	Persentase target kesehatan nasional selaras dengan target global	80	
07	Tersedianya bahan kebijakan bidang sistem sumber daya kesehatan		513.750,0
07.01	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang farmasi	13	
07.02	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang alat kesehatan	16	
07.03	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang fasyankes	26	
Total			212.000.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya pengelolaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan</i>										300.000,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan										175.000,0
01.ABG.001	Analisis Situasi Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		175.000,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06.AEG.001	Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS-32)								006 - Anggaran Kesehatan		796.806,0
	701 - Persiapan										2.025,0
		Pusat	Pusat								2.025,0
	702 - Pelaksanaan Sidang/Pertemuan Internasional										794.781,0
		Pusat	Pusat								794.781,0
06.AEG.002	Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (RF-19)								006 - Anggaran Kesehatan		52.829,0
	701 - Persiapan										2.025,0
		Pusat	Pusat								2.025,0
	702 - Pelaksanaan Pertemuan Internasional										50.804,0
		Pusat	Pusat								50.804,0
06.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										111.183,0
06.FAE.002	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		111.183,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										155.838,0
		Pusat	Pusat								155.838,0
07.ABG.012	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang fasyankes (PK- 20)								006 - Anggaran Kesehatan		171.250,0
	701 - Persiapan										15.412,0
		Pusat	Pusat								15.412,0
	702 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										155.838,0
		Pusat	Pusat								155.838,0
Total											212.000.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya pengelolaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan				300.000,0				386.220,0	386.220,0	386.220,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan		175.000,0				185.960,0	185.960,0	185.960,0
01.ABG.001	Analisis Situasi Kesehatan	1	Rekomendasi Kebijakan		175.000,0	1	1	1	185.960,0	185.960,0	185.960,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.ABG.001.701	Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Wilayah	1,0	Laporan	141.040,0	141.040,0	1,0	1,0	1,0	152.000,0	152.000,0	152.000,0
01.ABG.001.702	Analisis Isu Strategis Kesehatan	1,0	Laporan	15.030,0	15.030,0	1,0	1,0	1,0	15.030,0	15.030,0	15.030,0
01.ABG.001.703	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1,0	Laporan	18.930,0	18.930,0	1,0	1,0	1,0	18.930,0	18.930,0	18.930,0
01.AEB	Forum		forum		75.000,0				104.960,0	104.960,0	104.960,0
01.AEB.001	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1	forum		75.000,0	1	1	1	104.960,0	104.960,0	104.960,0
01.AEB.001.701	Pendampingan Review Analisis Rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan	1,0	Laporan	2.000,0	2.000,0	1,0	1,0	1,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
01.AEB.001.702	Pendampingan Kebijakan Bidang Kesehatan	1,0	Laporan	2.960,0	2.960,0	1,0	1,0	1,0	2.960,0	2.960,0	2.960,0
01.AEB.001.703	Pendampingan Penyusunan Peraturan Pelaksana UU/PP Kesehatan	1,0	Laporan	70.040,0	70.040,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.BMB	Komunikasi Publik		layanan		50.000,0				95.300,0	95.300,0	95.300,0
01.BMB.001	Layanan Diseminasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	1	layanan		50.000,0	1	1	1	95.300,0	95.300,0	95.300,0
01.BMB.001.701	Persiapan dan Finalisasi	1,0	Laporan	4.500,0	4.500,0	1,0	1,0	1,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
01.BMB.001.702	Pelaksanaan Diseminasi dan Komunikasi Hasil Analisis	1,0	Laporan	31.646,0	31.646,0	1,0	1,0	1,0	75.000,0	75.000,0	75.000,0
01.BMB.001.703	Strategi Komunikasi Kebijakan	1,0	Laporan	13.854,0	13.854,0	1,0	1,0	1,0	15.800,0	15.800,0	15.800,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02	Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti				1.850.000,0				2.592.000,0	2.592.000,0	2.592.000,0
02.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan		570.000,0				592.000,0	592.000,0	592.000,0
02.ABG.002	Pengembangan Kebijakan Baru bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	1	Rekomendasi Kebijakan		70.000,0	1	1	1	79.500,0	79.500,0	79.500,0
02.ABG.002.701	Persiapan	1,0	Laporan	9.500,0	9.500,0	1,0	1,0	1,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0
02.ABG.002.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	60.500,0	60.500,0	1,0	1,0	1,0	70.000,0	70.000,0	70.000,0
02.ABG.003	Evaluasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	5	Rekomendasi Kebijakan		500.000,0	5	5	5	512.500,0	512.500,0	512.500,0
02.ABG.003.701	Persiapan	1,0	Laporan	12.500,0	12.500,0	1,0	1,0	1,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0
02.ABG.003.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	487.500,0	487.500,0	1,0	1,0	1,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
02.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		280.000,0				500.000,0	500.000,0	500.000,0
02.FBA.001	Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Upaya Kesehatan	9	Provinsi		280.000,0	9	9	9	500.000,0	500.000,0	500.000,0
02.FBA.001.701	Persiapan	1,0	Laporan	20.790,0	20.790,0	1,0	1,0	1,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
02.FBA.001.702	Pelaksanaan Integrasi Kebijakan	1,0	Laporan	259.210,0	259.210,0	1,0	1,0	1,0	470.000,0	470.000,0	470.000,0
02.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan		1.000.000,0				1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (LP-1)	1	Rekomendasi Kebijakan		1.000.000,0	1	1	1	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
02.PBG.001.701	Persiapan	1,0	Laporan	38.250,0	38.250,0	1,0	1,0	1,0	75.000,0	75.000,0	75.000,0
02.PBG.001.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	961.750,0	961.750,0	1,0	1,0	1,0	1.425.000,0	1.425.000,0	1.425.000,0
03	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan berbasis bukti				900.000,0				1.193.500,0	1.193.500,0	1.193.500,0
03.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan		550.000,0				693.500,0	693.500,0	693.500,0
03.ABG.004	Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan (RF 13)	1	Rekomendasi Kebijakan		50.000,0	1	1	1	73.500,0	73.500,0	73.500,0
03.ABG.004.701	Persiapan	1,0	Laporan	3.500,0	3.500,0	1,0	1,0	1,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
03.ABG.004.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	46.500,0	46.500,0	1,0	1,0	1,0	70.000,0	70.000,0	70.000,0
03.ABG.005	Evaluasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan (HS-35)	6	Rekomendasi Kebijakan		500.000,0	6	6	6	620.000,0	620.000,0	620.000,0
03.ABG.005.701	Persiapan	1,0	Laporan	20.000,0	20.000,0	1,0	1,0	1,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
03.ABG.005.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	480.000,0	480.000,0	1,0	1,0	1,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
03.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		350.000,0				500.000,0	500.000,0	500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.FBA.002	Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	10	Provinsi		350.000,0	10	10	10	500.000,0	500.000,0	500.000,0
03.FBA.002.701	Persiapan	1,0	Laporan	10.000,0	10.000,0	1,0	1,0	1,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
03.FBA.002.702	Pelaksanaan Integrasi Kebijakan	1,0	Laporan	340.000,0	340.000,0	1,0	1,0	1,0	470.000,0	470.000,0	470.000,0
04	Meningkatnya kebijakan sistem sumber daya kesehatan berbasis bukti				1.786.250,0				7.351.606,0	7.535.679,0	7.725.274,0
04.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan		705.000,0				715.850,0	715.850,0	715.850,0
04.ABG.006	Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)	1	Rekomendasi Kebijakan		65.000,0	1	1	1	75.850,0	75.850,0	75.850,0
04.ABG.006.701	Persiapan	1,0	Laporan	5.850,0	5.850,0	1,0	1,0	1,0	5.850,0	5.850,0	5.850,0
04.ABG.006.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	59.150,0	59.150,0	1,0	1,0	1,0	70.000,0	70.000,0	70.000,0
04.ABG.007	Evaluasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)	5	Rekomendasi Kebijakan		640.000,0	5	5	5	640.000,0	640.000,0	640.000,0
04.ABG.007.701	Persiapan	1,0	Laporan	57.600,0	57.600,0	1,0	1,0	1,0	57.600,0	57.600,0	57.600,0
04.ABG.007.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	582.400,0	582.400,0	1,0	1,0	1,0	582.400,0	582.400,0	582.400,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		60.000,0				500.000,0	500.000,0	500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.FBA.003	Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	9	Provinsi		60.000,0	9	9	9	500.000,0	500.000,0	500.000,0
04.FBA.003.701	Persiapan	1,0	Laporan	5.400,0	5.400,0	1,0	1,0	1,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
04.FBA.003.702	Pelaksanaan integrasi kebijakan	1,0	Laporan	54.600,0	54.600,0	1,0	1,0	1,0	470.000,0	470.000,0	470.000,0
04.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan		1.021.250,0				6.135.756,0	6.319.829,0	6.509.424,0
04.PBG.002	Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assessment (PK-19)	2	Rekomendasi Kebijakan		850.000,0	7	8	9	4.693.756,0	4.834.569,0	4.979.606,0
04.PBG.002.701	Persiapan	1,0	Laporan	76.500,0	76.500,0	1,0	1,0	1,0	422.000,0	435.000,0	448.000,0
04.PBG.002.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	773.500,0	773.500,0	1,0	1,0	1,0	4.271.756,0	4.399.569,0	4.531.606,0
04.PBG.003	Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Kesehatan (PK- 20)	1	Rekomendasi Kebijakan		171.250,0	1	1	2	1.442.000,0	1.485.260,0	1.529.818,0
04.PBG.003.701	Persiapan	1,0	Laporan	15.412,0	15.412,0	1,0	1,0	1,0	129.000,0	133.000,0	137.000,0
04.PBG.003.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	155.838,0	155.838,0	1,0	1,0	1,0	1.313.000,0	1.352.260,0	1.392.818,0
05	Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti				574.920,0				864.803,0	864.803,0	864.803,0
05.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan		225.342,0				253.620,0	253.620,0	253.620,0
05.ABG.008	Pengembangan Kebijakan Baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (TK-31)	2	Rekomendasi Kebijakan		149.688,0	2	2	2	152.000,0	152.000,0	152.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
05.ABG.008.701	Persiapan	1,0	Laporan	1.620,0	1.620,0	1,0	1,0	1,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
05.ABG.008.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	148.068,0	148.068,0	1,0	1,0	1,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
05.ABG.009	Evaluasi Kebijakan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (HS-29)	1	Rekomendasi Kebijakan		75.654,0	1	1	1	101.620,0	101.620,0	101.620,0
05.ABG.009.701	Persiapan	1,0	Laporan	1.620,0	1.620,0	1,0	1,0	1,0	1.620,0	1.620,0	1.620,0
05.ABG.009.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	74.034,0	74.034,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
05.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Layanan		111.183,0				111.183,0	111.183,0	111.183,0
05.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Ketercapaian SPM Kesehatan	1	Laporan		111.183,0	1	1	1	111.183,0	111.183,0	111.183,0
05.FAE.001.701	Persiapan	1,0	Laporan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	3.240,0	3.240,0	3.240,0
05.FAE.001.702	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Ketercapaian SPM Kesehatan	1,0	Laporan	107.943,0	107.943,0	1,0	1,0	1,0	107.943,0	107.943,0	107.943,0
05.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		238.395,0				500.000,0	500.000,0	500.000,0
05.FBA.004	Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	10	Provinsi		238.395,0	10	10	10	500.000,0	500.000,0	500.000,0
05.FBA.004.701	Persiapan	1,0	Laporan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
05.FBA.004.702	Pelaksanaan Integrasi Kebijakan	1,0	Laporan	235.155,0	235.155,0	1,0	1,0	1,0	470.000,0	470.000,0	470.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
06	Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan				206.075.080,0				206.280.968,0	206.280.968,0	206.280.968,0
06.AEC	Kerja sama		Kesepakatan		205.114.262,0				205.320.150,0	205.320.150,0	205.320.150,0
06.AEC.001	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan (RF-14)	3	Kesepakatan		187.316,0	3	3	3	204.000,0	204.000,0	204.000,0
06.AEC.001.701	Persiapan	1,0	Laporan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
06.AEC.001.702	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri	1,0	Laporan	184.076,0	184.076,0	1,0	1,0	1,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
06.AEC.002	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF-14)	3	Kesepakatan		187.316,0	3	3	3	204.000,0	204.000,0	204.000,0
06.AEC.002.701	Persiapan	1,0	Laporan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
06.AEC.002.702	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri	1,0	Laporan	184.076,0	184.076,0	1,0	1,0	1,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
06.AEC.003	Operasionalisasi ACHPEED (HS-29)	1	Kesepakatan		22.501.215,0	1	1	1	22.501.215,0	22.501.215,0	22.501.215,0
06.AEC.003.701	Persiapan	1,0	Laporan	1.215,0	1.215,0	1,0	1,0	1,0	1.215,0	1.215,0	1.215,0
06.AEC.003.702	Operasionalisasi ACHPEED	1,0	Laporan	22.500.000,0	22.500.000,0	1,0	1,0	1,0	22.500.000,0	22.500.000,0	22.500.000,0
06.AEC.004	Dokumen Kerja Sama Mitra Pembangunan dan Transformasi Kesehatan (HS-32)	3	Kesepakatan		374.632,0	3	3	3	406.480,0	406.480,0	406.480,0
06.AEC.004.701	Persiapan	1,0	Laporan	6.480,0	6.480,0	1,0	1,0	1,0	6.480,0	6.480,0	6.480,0
06.AEC.004.702	Penyusunan Dokumen Kerja Sama	1,0	Laporan	368.152,0	368.152,0	1,0	1,0	1,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
06.AEC.006	Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional Non Pemerintah (HS-32)	2	Kesepakatan		181.501.215,0	2	2	2	181.501.215,0	181.501.215,0	181.501.215,0
06.AEC.006.701	Persiapan	1,0	Laporan	1.215,0	1.215,0	1,0	1,0	1,0	1.215,0	1.215,0	1.215,0
06.AEC.006.702	Pelaksanaan Komitmen Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional	1,0	Laporan	181.500.000,0	181.500.000,0	1,0	1,0	1,0	181.500.000,0	181.500.000,0	181.500.000,0
06.AEC.007	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS-32)	3	Kesepakatan		362.568,0	3	3	3	503.240,0	503.240,0	503.240,0
06.AEC.007.701	Persiapan	1,0	Laporan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	3.240,0	3.240,0	3.240,0
06.AEC.007.702	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri	1,0	Laporan	359.328,0	359.328,0	1,0	1,0	1,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
06.AEG	Konferensi dan Event		Kegiatan		849.635,0				849.635,0	849.635,0	849.635,0
06.AEG.001	Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS-32)	20	Kegiatan		796.806,0	20	20	20	796.806,0	796.806,0	796.806,0
06.AEG.001.701	Persiapan	1,0	Laporan	2.025,0	2.025,0	1,0	1,0	1,0	2.025,0	2.025,0	2.025,0
06.AEG.001.702	Pelaksanaan Sidang/Pertemuan Internasional	1,0	Laporan	794.781,0	794.781,0	1,0	1,0	1,0	794.781,0	794.781,0	794.781,0
06.AEG.002	Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (RF-19)	2	Kegiatan		52.829,0	2	2	2	52.829,0	52.829,0	52.829,0
06.AEG.002.701	Persiapan	1,0	Laporan	2.025,0	2.025,0	1,0	1,0	1,0	2.025,0	2.025,0	2.025,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
06.AEG.002.702	Pelaksanaan Pertemuan Internasional	1,0	Laporan	50.804,0	50.804,0	1,0	1,0	1,0	50.804,0	50.804,0	50.804,0
06.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Layanan		111.183,0				111.183,0	111.183,0	111.183,0
06.FAE.002	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan	1	Laporan		111.183,0	1	1	1	111.183,0	111.183,0	111.183,0
06.FAE.002.701	Persiapan	1,0	Laporan	3.240,0	3.240,0	1,0	1,0	1,0	3.240,0	3.240,0	3.240,0
06.FAE.002.702	Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Kebijakan	1,0	Laporan	107.943,0	107.943,0	1,0	1,0	1,0	107.943,0	107.943,0	107.943,0
07	Tersedianya bahan kebijakan bidang sistem sumber daya kesehatan				513.750,0				556.236,0	556.236,0	556.236,0
07.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan		513.750,0				556.236,0	556.236,0	556.236,0
07.ABG.010	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang farmasi (PK-20)	1	Rekomendasi Kebijakan		171.250,0	1	1	1	185.412,0	185.412,0	185.412,0
07.ABG.010.701	Persiapan	1,0	Laporan	15.412,0	15.412,0	1,0	1,0	1,0	15.412,0	15.412,0	15.412,0
07.ABG.010.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	155.838,0	155.838,0	1,0	1,0	1,0	170.000,0	170.000,0	170.000,0
07.ABG.011	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang alkes (PK-20)	1	Rekomendasi Kebijakan		171.250,0	1	1	1	185.412,0	185.412,0	185.412,0
07.ABG.011.701	Persiapan	1,0	Laporan	15.412,0	15.412,0	1,0	1,0	1,0	15.412,0	15.412,0	15.412,0
07.ABG.011.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	155.838,0	155.838,0	1,0	1,0	1,0	170.000,0	170.000,0	170.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
07.ABG.012	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang fasyankes (PK-20)	1	Rekomendasi Kebijakan		171.250,0	1	1	1	185.412,0	185.412,0	185.412,0
07.ABG.012.701	Persiapan	1,0	Laporan	15.412,0	15.412,0	1,0	1,0	1,0	15.412,0	15.412,0	15.412,0
07.ABG.012.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	1,0	Laporan	155.838,0	155.838,0	1,0	1,0	1,0	170.000,0	170.000,0	170.000,0
Total					212.000.000,0	-	-	-	219.225.333,0	219.409.406,0	219.599.001,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
07.ABG.010	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang farmasi (PK-20)		171.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171.250,0
07.ABG.010.701	Persiapan	Pendukung	15.412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.412,0
07.ABG.010.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Utama	155.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.838,0
07.ABG.011	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang alkes (PK-20)		171.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171.250,0
07.ABG.011.701	Persiapan	Pendukung	15.412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.412,0
07.ABG.011.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Utama	155.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.838,0
07.ABG.012	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang fasyankes (PK-20)		171.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171.250,0
07.ABG.012.701	Persiapan	Pendukung	15.412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.412,0
07.ABG.012.702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Utama	155.838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.838,0
Total			212.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212.000.000,0

Jakarta, 12 Agustus 2025
Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan


dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H
NIP. 197607202008012008

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan
4. KEGIATAN : 6797 - Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 08 - Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		18.479.404,0
01.01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	78	
01.02	Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,55	
01.03	Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95,1	
01.04	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	4	
01.05	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	
Total			18.479.404,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								200.000,0
	716 - Pengelolaan Layanan Kesehatan										15.000,0
		Pusat	Pusat								15.000,0
	717 - Layanan Umum Unit Kerja										160.000,0
		Pusat	Pusat								160.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								006 - Anggaran Kesehatan		10.000,0
	701 - Pengorganisasian dan Pengelolaan Data										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum								006 - Anggaran Kesehatan		10.000,0
	701 - Advokasi dan Pendampingan Hukum										8.200,0
		Pusat	Pusat								8.200,0
	702 - Layanan Unit Pengendalian Gratifikasi										1.800,0
		Pusat	Pusat								1.800,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								35.000,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								006 - Anggaran Kesehatan		35.000,0
	721 - Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan										17.000,0
		Pusat	Pusat								17.000,0
	723 - Monitoring dan Evaluasi Keuangan										6.800,0
		Pusat	Pusat								6.800,0
	724 - Pengelolaan Perbendaharaan										11.200,0
		Pusat	Pusat								11.200,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								006 - Anggaran Kesehatan		18.000,0
	721 - Pengelolaan RB dan WBK/WBBM										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
	722 - Penyelenggaraan SPIP										8.000,0
		Pusat	Pusat								8.000,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								006 - Anggaran Kesehatan		5.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	721 - Penatausahaan Kearsipan										5.000,0
		Pusat	Pusat								5.000,0
Total											18.479.404,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				18.479.404,0				55.420.079,0	55.420.079,0	55.420.079,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		72.395,0				60.000,0	60.000,0	60.000,0
01.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit		72.395,0	1	1	1	60.000,0	60.000,0	60.000,0
01.CAN.951.715	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,0	Laporan	72.395,0	72.395,0	1,0	1,0	1,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		424.632,0				430.482,0	430.482,0	430.482,0
01.CCL.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	Unit		424.632,0	1	1	1	430.482,0	430.482,0	430.482,0
01.CCL.951.701	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,0	Laporan	93.966,0	93.966,0	1,0	1,0	1,0	119.070,0	119.070,0	119.070,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.CCL.951.702	Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan	1,0	Laporan	12.000,0	12.000,0	1,0	1,0	1,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0
01.CCL.951.703	Pemeliharaan Prasarana TIK	1,0	Laporan	49.462,0	49.462,0	1,0	1,0	1,0	49.462,0	49.462,0	49.462,0
01.CCL.951.704	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	1,0	Laporan	269.204,0	269.204,0	1,0	1,0	1,0	249.950,0	249.950,0	249.950,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		17.417.377,0				54.364.597,0	54.364.597,0	54.364.597,0
01.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		15.000,0	1	1	1	22.628,0	22.628,0	22.628,0
01.EBA.956.715	Pengelolaan BMN	1,0	Laporan	15.000,0	15.000,0	1,0	1,0	1,0	22.628,0	22.628,0	22.628,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		40.000,0	1	1	1	78.320,0	78.320,0	78.320,0
01.EBA.957.701	Pelaksanaan Layanan Penyusunan Regulasi	1,0	Laporan	3.040,0	3.040,0	1,0	1,0	1,0	3.040,0	3.040,0	3.040,0
01.EBA.957.702	Penyusunan Dokumen Kerja Sama (MOU/PKS)	1,0	Laporan	34.108,0	34.108,0	1,0	1,0	1,0	34.108,0	34.108,0	34.108,0
01.EBA.957.703	Bimtek Hukum	1,0	Laporan	1.680,0	1.680,0	1,0	1,0	1,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0
01.EBA.957.704	Layanan Kekayaan Intelektual	1,0	Laporan	1.172,0	1.172,0	1,0	1,0	1,0	1.172,0	1.172,0	1.172,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		21.455,0	1	1	1	21.455,0	21.455,0	21.455,0
01.EBA.958.722	Pengelolaan Hubungan Masyarakat	1,0	Laporan	21.455,0	21.455,0	1,0	1,0	1,0	21.455,0	21.455,0	21.455,0
01.EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		92.518,0	1	1	1	92.518,0	92.518,0	92.518,0
01.EBA.959.701	Layanan Protokoler	1,0	Laporan	92.518,0	92.518,0	1,0	1,0	1,0	92.518,0	92.518,0	92.518,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		40.000,0	1	1	1	40.000,0	40.000,0	40.000,0
01.EBA.960.705	Penataan Organisasi	1,0	Laporan	15.000,0	15.000,0	1,0	1,0	1,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
01.EBA.960.707	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	1,0	Laporan	10.000,0	10.000,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
01.EBA.960.708	Pelaksanaan Koordinasi Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen Risiko	1,0	Laporan	15.000,0	15.000,0	1,0	1,0	1,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		709.000,0	1	1	1	709.000,0	709.000,0	709.000,0
01.EBA.962.711	Pengelolaan Tata Persuratan	1,0	Laporan	5.000,0	5.000,0	1,0	1,0	1,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
01.EBA.962.712	Pengelolaan Kerumahtanggaan	1,0	Laporan	69.000,0	69.000,0	1,0	1,0	1,0	69.000,0	69.000,0	69.000,0
01.EBA.962.713	Layanan Pimpinan	1,0	Laporan	250.000,0	250.000,0	1,0	1,0	1,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0
01.EBA.962.714	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1,0	Laporan	10.000,0	10.000,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
01.EBA.962.715	Layanan Perpustakaan	1,0	Laporan	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	1,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBA.962.716	Pengelolaan Layanan Kesehatan	1,0	Layanan	15.000,0	15.000,0	1,0	1,0	1,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
01.EBA.962.717	Layanan Umum Unit Kerja	1,0	Layanan	160.000,0	160.000,0	1,0	1,0	1,0	160.000,0	160.000,0	160.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		10.000,0	1	1	1	10.000,0	10.000,0	10.000,0
01.EBA.963.701	Pengorganisasian dan Pengelolaan Data	1,0	Laporan	10.000,0	10.000,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		10.000,0	1	1	1	11.800,0	11.800,0	11.800,0
01.EBA.969.701	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1,0	Laporan	8.200,0	8.200,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
01.EBA.969.702	Layanan Unit Pengendalian Gratifikasi	1,0	Laporan	1.800,0	1.800,0	1,0	1,0	1,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		16.479.404,0	1	1	1	53.378.876,0	53.378.876,0	53.378.876,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Laporan	16.479.404,0	16.479.404,0	1,0	1,0	1,0	53.378.876,0	53.378.876,0	53.378.876,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		318.000,0				318.000,0	318.000,0	318.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	4	Unit		318.000,0	1	1	1	318.000,0	318.000,0	318.000,0
01.EBB.951.722	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,0	Laporan	318.000,0	318.000,0	1,0	1,0	1,0	318.000,0	318.000,0	318.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		105.000,0				105.000,0	105.000,0	105.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	388	Orang		45.000,0	388	388	388	45.000,0	45.000,0	45.000,0
01.EBC.954.723	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	388,0	Laporan	116,0	45.000,0	388,0	388,0	3.880,0	45.000,0	45.000,0	45.000,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang		60.000,0	50	50	50	60.000,0	60.000,0	60.000,0
01.EBC.996.701	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	50,0	Laporan	1.096,6	54.830,0	50,0	50,0	50,0	54.830,0	54.830,0	54.830,0
01.EBC.996.702	Pengembangan Kompetensi SDM	50,0	Laporan	103,4	5.170,0	50,0	50,0	50,0	5.170,0	5.170,0	5.170,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		142.000,0				142.000,0	142.000,0	142.000,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen		49.000,0	2	2	2	49.000,0	49.000,0	49.000,0
01.EBD.952.721	Penyusunan Perencanaan	1,0	Laporan	22.000,0	22.000,0	1,0	1,0	1,0	22.000,0	22.000,0	22.000,0
01.EBD.952.722	Penyusunan Anggaran	1,0	Laporan	27.000,0	27.000,0	1,0	1,0	1,0	27.000,0	27.000,0	27.000,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen		35.000,0	1	1	1	35.000,0	35.000,0	35.000,0
01.EBD.953.721	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,0	Laporan	35.000,0	35.000,0	1,0	1,0	1,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen		35.000,0	1	1	1	35.000,0	35.000,0	35.000,0
01.EBD.955.721	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan	1,0	Laporan	17.000,0	17.000,0	1,0	1,0	1,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0
01.EBD.955.723	Monitoring dan Evaluasi Keuangan	1,0	Laporan	6.800,0	6.800,0	1,0	1,0	1,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0
01.EBD.955.724	Pengelolaan Perbendaharaan	1,0	Laporan	11.200,0	11.200,0	1,0	1,0	1,0	11.200,0	11.200,0	11.200,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen		18.000,0	1	1	1	18.000,0	18.000,0	18.000,0
01.EBD.961.721	Pengelolaan RB dan WBK/WBBM	1,0	Laporan	10.000,0	10.000,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
01.EBD.961.722	Penyelenggaraan SPIP	1,0	Laporan	8.000,0	8.000,0	1,0	1,0	1,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan		5.000,0	1	1	1	5.000,0	5.000,0	5.000,0
01.EBD.974.721	Penatausahaan Kearsipan	1,0	Laporan	5.000,0	5.000,0	1,0	1,0	1,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Total					18.479.404,0	-	-	-	55.420.079,0	55.420.079,0	55.420.079,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.952.721	Penyusunan Perencanaan	Utama	22.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.000,0
01.EBD.952.722	Penyusunan Anggaran	Utama	27.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.000,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.EBD.953.721	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Utama	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
01.EBD.955.721	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan	Utama	17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.000,0
01.EBD.955.723	Monitoring dan Evaluasi Keuangan	Utama	6.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.800,0
01.EBD.955.724	Pengelolaan Perbendaharaan	Utama	11.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.200,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0
01.EBD.961.721	Pengelolaan RB dan WBK/WBBM	Utama	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.EBD.961.722	Penyelenggaraan SPIP	Utama	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.EBD.974.721	Penatausahaan Kearsipan	Utama	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Total			18.479.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.479.404,0

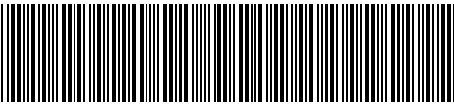
Jakarta, 12 Agustus 2025
Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan



dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H
NIP. 197607202008012008

LAMPIRAN II

DIPA BKPK TAHUN 2026



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 024.11.1.416151/2026

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 - 2. Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 - 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 - 4. Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 - Sebesar : Rp. 230.479.404.000 (DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN
07.90 KESEHATAN LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	230.479.404.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN JAKARTA VII (182) Rp. 230.479.404.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

JAKARTA, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

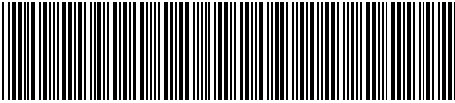
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026

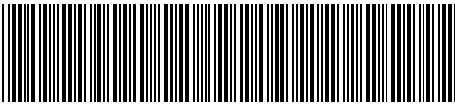


DS:9014-6037-0212-1001

Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

D1	Program Sumber Daya Kesehatan	Rp.	212.000.000.000
D1.7969	Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	212.000.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	18.479.404.000
WA.6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	18.479.404.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
I A. INFORMASI KINERJA



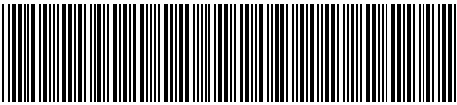
DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	024.11.D1	Program Sumber Daya Kesehatan			212.000.000.000
Kegiatan	:	7969	Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			212.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Pemenuhan pembiayaan untuk mendukung terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Kesehatan			
		2. 01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah I			
		3. 01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah II			
		4. 01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah III			
		5. 01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah IV			
		6. 01	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang farmasi			
		7. 01	Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional			
		8. 02	Jumlah peran strategis Indonesia pada OI/pertemuan internasional bidang kesehatan			
		9. 02	Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan			
		10. 02	Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan			
		11. 02	Persentase analisis kebijakan di bidang Upaya Kesehatan			
		12. 02	Persentase capaian SPM Kesehatan kab/kota yang telah divalidasi			
		13. 02	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang alat kesehatan			
		14. 03	Persentase analisis kebijakan di bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global			
		15. 03	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang fasyankes			
		16. 03	Persentase target kesehatan nasional selaras dengan target global			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	7969.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	26,00	Rekomendasi Kebijakan	2.653.342.000
Rincian Output	:	01	ABG.001 Analisis Situasi Kesehatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	175.000.000
		02	ABG.002 Pengembangan Kebijakan Baru bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	70.000.000
		03	ABG.003 Evaluasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	5.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
		04	ABG.004 Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan (RF 13)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
I A. INFORMASI KINERJA

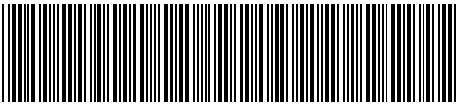


DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kebijakan Bidang Kesehatan				Rekomendasi Kebijakan		
	05	ABG.005	Evaluasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan (HS-35)	6.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	06	ABG.006	Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	60.000.000
	07	ABG.007	Evaluasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)	5.00	Rekomendasi Kebijakan	845.000.000
	08	ABG.008	Pengembangan Kebijakan Baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (TK-31)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	101.688.000
	09	ABG.009	Evaluasi Kebijakan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (HS-29)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	51.654.000
	10	ABG.010	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang farmasi (PK-20)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
	11	ABG.011	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang alkes (PK-20)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
	12	ABG.012	Rekomendasi Kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang fasyankes (PK-20)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7969.AEB Forum	1,00	forum	75.000.000
Rincian Output	:	01	AEB.001 Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1.00	forum	75.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7969.AEC Kerja sama	15,00	Kesepakatan	204.961.962.000
Rincian Output	:	01	AEC.001 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan (RF-14)	3.00	Kesepakatan	156.306.000
		02	AEC.002 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF-14)	3.00	Kesepakatan	156.306.000
		03	AEC.003 Operasionalisasi ACHPEED (HS-29)	1.00	Kesepakatan	22.501.215.000
		04	AEC.004 Dokumen Kerja Sama Mitra Pembangunan dan Transformasi Kesehatan (HS-32)	3.00	Kesepakatan	312.612.000
		05	AEC.006 Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional Non Pemerintah (HS-32)	2.00	Kesepakatan	181.501.215.000
		06	AEC.007 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	3.00	Kesepakatan	334.308.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
I A. INFORMASI KINERJA

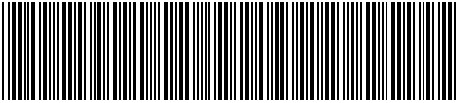


DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kerja sama				Kesepakatan		
(HS-32)				3.00	Kesepakatan	
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7969.AEG Konferensi dan Event	22,00	Kegiatan	1.174.870.000
Rincian Output	:	01	AEG.001 Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS-32)	20.00	Kegiatan	1.122.041.000
		02	AEG.002 Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (RF-19)	2.00	Kegiatan	52.829.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7969.BMB Komunikasi Publik	1,00	layanan	50.000.000
Rincian Output	:	01	BMB.001 Layanan Diseminasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	1.00	layanan	50.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7969.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,00	Laporan, Layanan	155.076.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Ketercapaian SPM Kesehatan	1.00	Laporan	77.538.000
		02	FAE.002 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan	1.00	Laporan	77.538.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7969.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	894.750.000
Rincian Output	:	01	FBA.001 Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Upaya Kesehatan	9.00	Provinsi	280.000.000
		02	FBA.002 Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	10.00	Provinsi	350.000.000
		03	FBA.003 Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	9.00	Provinsi	60.000.000
		04	FBA.004 Strategi Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	10.00	Provinsi	204.750.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
I A. INFORMASI KINERJA



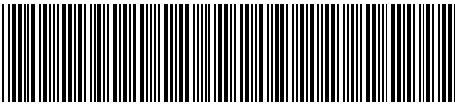
DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	7969.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	2.035.000.000
Rincian Output	:	01	PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		02	PBG.002	Pemeriksaan Kesehatan Gratis (LP-1)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	850.000.000
		03	PBG.003	Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assessment (PK-19) (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	185.000.000
Program	:	024.11.WA	Program Dukungan Manajemen				18.479.404.000
Kegiatan	:	6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				18.479.404.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
		2. 02	Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
		3. 03	Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
		4. 04	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
		5. 05	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	Unit	72.395.000
Rincian Output	:	01	CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.00	Unit	72.395.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6797.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,00	Unit	424.632.000
Rincian Output	:	01	CCL.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.00	Unit	424.632.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	17.415.577.000
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	15.000.000
		02	EBA.957	Layanan Hukum	1.00	Layanan	40.000.000
		03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	21.455.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9014-6037-0212-1001

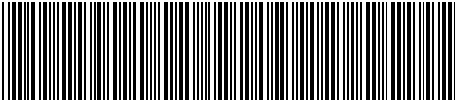
Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
	04	EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	92.518.000
	05	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	40.000.000
	06	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	709.000.000
	07	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	10.000.000
	08	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	8.200.000
	09	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	16.479.404.000
Klasifikasi Rincian Output	4	: 6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	318.000.000
Rincian Output	: 01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	318.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	: 6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	438,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	105.000.000
Rincian Output	: 01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	388.00	Orang	45.000.000
	02	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	50.00	Orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	: 6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	143.800.000
Rincian Output	: 01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	49.000.000
	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	35.000.000
	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	35.000.000
	04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	19.800.000
	05	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	5.000.000

JAKARTA, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
I B. SUMBER DANA



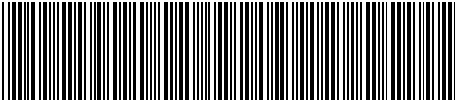
DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	230.479.404.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	230.479.404.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



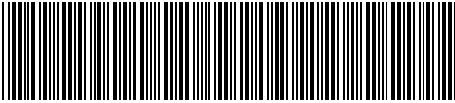
DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	-	230.098.276	381.128	-	-	230.479.404	01 . 51	
024.11.D1	Program Sumber Daya Kesehatan	-	212.000.000	-	-	-	212.000.000		
7969	Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	212.000.000	-	-	-	212.000.000		
7969.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.653.342	-	-	-	2.653.342		
01	RM	-	2.653.342	-	-	-	2.653.342		
7969.AEB	Forum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	75.000	-	-	-	75.000		
01	RM	-	75.000	-	-	-	75.000		
7969.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	204.961.962	-	-	-	204.961.962		
01	RM	-	204.961.962	-	-	-	204.961.962		
7969.AEG	Konferensi dan Event (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.174.870	-	-	-	1.174.870		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



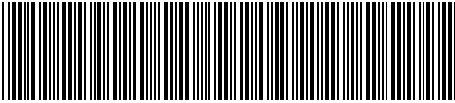
DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	1.174.870	-	-	-	1.174.870	182	
7969.BMB	Komunikasi Publik	-	50.000	-	-	-	50.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01 RM		-	50.000	-	-	-	50.000	182	
7969.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	155.076	-	-	-	155.076	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01 RM		-	155.076	-	-	-	155.076	182	
7969.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	-	894.750	-	-	-	894.750	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01 RM		-	894.750	-	-	-	894.750	182	
7969.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	2.035.000	-	-	-	2.035.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01 RM		-	2.035.000	-	-	-	2.035.000	182	
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	18.098.276	381.128	-	-	18.479.404		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



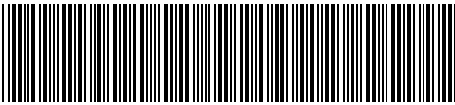
DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	18.098.276	381.128	-	-	18.479.404		
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.395	60.000	-	-	72.395	01 . 51	
01	RM	-	12.395	60.000	-	-	72.395	182@	
6797.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	424.632	-	-	-	424.632	01 . 51	
01	RM	-	424.632	-	-	-	424.632	182	
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	17.411.577	4.000	-	-	17.415.577	01 . 51	
01	RM	-	17.411.577	4.000	-	-	17.415.577	182	
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	872	317.128	-	-	318.000	01 . 51	
01	RM	-	872	317.128	-	-	318.000	182	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

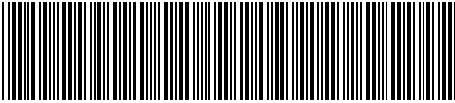
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	105.000	-	-	-	105.000	01 . 51	
	01 RM	-	105.000	-	-	-	105.000	182	
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	143.800	-	-	-	143.800	01 . 51	
	01 RM	-	143.800	-	-	-	143.800	182	
JUMLAH		-	230.098.276	381.128	-	-	230.479.404		

JAKARTA, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

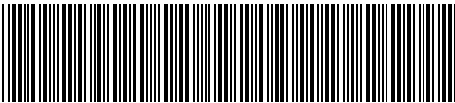
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	870.818	1.109.425	1.488.143	3.935.885	185.297.732	4.194.833	4.256.681	4.038.952	4.179.345	4.129.907	3.684.734	13.292.950	230.479.404
		BELANJA BARANG	870.818	1.080.200	1.475.516	3.874.005	185.281.364	4.153.111	4.224.494	4.005.832	4.128.799	4.079.964	3.644.333	13.279.841	230.098.276
		BELANJA MODAL	0	29.224	12.628	61.880	16.368	41.722	32.187	33.121	50.546	49.943	40.400	13.109	381.128
		024.11.D1.7969 Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	154.545	316.349	493.359	2.497.277	184.073.698	2.591.710	2.693.698	2.679.346	2.551.500	2.546.992	2.508.736	8.892.790	212.000.000
		024.11.WA.6797 52 BELANJA BARANG DAN JASA	154.545	316.349	493.359	2.497.277	184.073.698	2.591.710	2.693.698	2.679.346	2.551.500	2.546.992	2.508.736	8.892.790	212.000.000
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	716.272	793.076	994.785	1.438.608	1.224.034	1.603.122	1.562.983	1.359.606	1.627.845	1.582.916	1.175.998	4.400.160	18.479.404
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	716.272	763.852	982.157	1.376.728	1.207.666	1.561.400	1.530.796	1.326.485	1.577.299	1.532.973	1.135.597	4.387.051	18.098.276
		53 BELANJA MODAL	0	29.224	12.628	61.880	16.368	41.722	32.187	33.121	50.546	49.943	40.400	13.109	381.128

JAKARTA, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
IV A. B L O K I R



DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

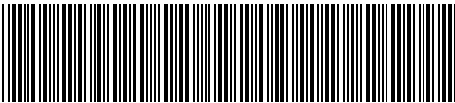
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 14.455.988		
	52 Belanja Barang Rp. 14.395.988		
	53 Belanja Modal Rp. 60.000		
024.11.D1	Program Sumber Daya Kesehatan		
7969	Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
7969.AEC	Kerja sama		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.395.988		
	Belum dilengkapi dokumen pendukung		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen		
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000		
	belum dilengkapi dokumen pendukung		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

JAKARTA, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2026
IV B. C A T A T A N



DS:9014-6037-0212-1001

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR KONTRIBUTOR

Penasihat

Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D. (Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Penanggung Jawab

dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H. (Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Tim Penyusun

Tri Ramadhany (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Nadya Miftahuljanna (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Sari Ramadhani (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Fairuz Wardaty (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Titin Delia (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Kontributor

Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan

Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global



Health Health Disease Agenda Setting
Forums Surveys Registry Evidence-based
Health Policy Health Economy Global Health
Technology Brief Think Tank Health Surveys
Assessment Health Transformation Policy Development
Health Technology Assessment Think
Disease Data-based Health Economy Tank
Registry Policy Action Implementation Research Agenda Setting
Think Tank Health Technology Assessment Data-based Policy Action
Agenda Setting Health Economy
Disease Registry Health
Health Forums Surveys
Disease Health Technology Assessment Disease Policy Development
Registry Global Health Partnership Registry Agenda Setting
Policy Recommendation Health Economy Evidence-based
Global Health Health Technology Assessment Policy Development
Partnership Think Policy Brief Health Economy
Policy Brief Tank Health Technology Assessment
Evidence-based Health Implementation Research
Think Tank Surveys Agenda Setting Evidence-based
Health Technology Assessment Policy Development
Health Economy Global Health Surveys Agenda Setting
Evidence-based Health Implementation Research
Partnership Policy Development
Policy Brief Implementation Research